

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Pengertian Politik

Banyak definisi dan ragam pengertiannya, namun dalam bab ini diskusi tentang politik dapat di maknai sebagai gerakan perempuan atau komunitas tertentu yang bertujuan meraih hak-hak dan keadilan, mempengaruhi kebijakan negara yang sudah secara formal dirumuskan dan di buat oleh penguasa agar kebijakan tersebut lebih sensitif pada kepedulian gender. Definisi ini di maknai pada cara pandang feminisme (Ebyhara, 2013).

Pemikiran politik merupakan bidang kajian ilmu politik yang cukup penting. Kajian pemikiran politik memfokuskan pada penyelidikan pemikiran-pemikiran dari tokoh politik, filsuf politik maupun kelompok sosial yang berpengaruh melalui ide-ide pokoknya. Pemikiran politik terdiri dari elemen-elemen ide, obsesi potensi intelektual dan sosialisasi politik, yang merupakan representasi realitas lingkungan sosial mengenai masalah negara, masyarakat, dan kekuasaan (Ebyhara, 2013).

Pemikiran politik mengalami sejarah-sejarah yang panjang dan tiap-tiap sejarah menunjukkan suatu gagasan yang berbeda. Berabad-abad lamanya manusia

mulai berpikir tentang dunia, termasuk politik, negara, dan hukum. Pemikiran itu juga mengiringi lahirnya peradaban-peradaban yang muncul, baik yang berkualitas tinggi maupun yang barbar sekalipun, yang kadang mengalami naik turun. Ada peradaban yang terus bertahan dan ada yang pernah muncul secara gemilang, tetapi hancur lebur tak tersisa apa-apa. Tentu harus mengingat peradaban-peradaban kuno seperti Babilonia, Mesir, dan Assiria. Ada kejajaman luar biasa dalam paruh kedua abad ke-8 SM dari raja Assiria Tiglathpileser III terhadap bangsa-bangsa yang ditaklukkannya dengan mencampur adukan bangsa-bangsa itu satu sama lain dan memusnahkan mereka untuk selama-lamanya (Ebyhara, 2013).

Akan tetapi juga ada peradaban yang dipimpin oleh raja-raja yang bijaksana baik dan arif, misalnya Raja Babilonia Hammurabi (sekitar 1.800 SM), yang setelah menguasai Babilonia selatan dan menjadi raja pertama dari seluruh Babilonia menghapuskan pertentangan-pertentangan antara kedua bangsa itu dengan satu perundang-undang sehingga dengan demikian ia menegakkan persatuan baru yaitu Babilonia yang terbagi-bagi, dengan Babilon sebagai ibu kotanya. Raja Hammurabi dikenal sebagai pembuat undang-undang tertua yang terkenal dalam sejarah (Ebyhara, 2013).

2.1.2 Feminisme

Teori feminisme berkembang dari gerakan perempuan di zaman 1960 yang memisahkan diri dari gerakan yang didominasi oleh laki-laki. Gerakan tersebut berusaha agar kaum perempuan hendak berbicara dengan suara mereka

sendiri. Secara alamiah, gerakan ini mengarah pada politik budaya feminis. Munculnya berbagai jenis teori feminis sebagai bentuk apresiasi keberagaman dunia maupun cerminan posisi kaum-kaum feminisme yang berbeda sehingga menimbulkan cara berbeda dalam menteroikan kondisi mereka (Ngangi, 2011).

2.1.2.1 Pelestarian *Nature* Perempuan

Harien (2013), menyebutkan teori *nature* merupakan jalan meruntuhkan sistem budaya patriarki, tetapi bukan dengan menghilangkan *nature*, melainkan dengan menunjukkan kekuatan dan kualitas feminim. Kemudian jika perempuan masuk ke dalam dunia maskulin dengan cara mempertahankan kualitas feminimnya, maka dunia dapat diubah dari struktur hierarkis atau patriarki menjadi egaliter atau matriarkis. Kemudian aliran yang menaungi teori ini merupakan pemikiran feminisme Radikal dan ekofeminisme.

Feminisme radikal berasumsi bahwa keadilan gender bersumber pada perbedaan-perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang hanya dapat termanifestasi dalam institusi keluarga. Adanya peraturan satu tahun cuti di Swedia pekerja perempuan dan 3-6 bulan untuk pekerja laki-laki. Dan lembaga perkawinan adalah lembaga formalisasi untuk menindas perempuan sehingga tujuannya adalah untuk mengakhiri *the tyranny of the biological family*. Cenderung membenci makhluk laki-laki sebagai individu atau kolektif. Lesbian ini lah menjadi salah satu pembebasan dari dominasi laki-laki (Susilo, 2016).

Ekofeminisme sama dengan aliran feminisme radikal yang menganggap ingin mengembalikan kesadaran manusia akan pentingnya dihidupkan kembali kualitas feminim dalam masyarakat. Tidak anti keluarga, melainkan mendukung peran keibuan tetapi masih menganggap bahwa sistem patriarki adalah sistem yang merusak. Mengkritik para feminis yang menyuruh perempuan membuang *nature*, karena dengan semakin banyaknya para perempuan yang mengadopsi kualitas maskulin, maka dunia tetap berstruktur maskulin, yaitu identik dengan penindasan. Sangat peduli dengan kerusakan lingkungan hidup karena menghilangnya kualitas pengasuhan dan pemeliharaan. Serta mengajak para perempuan untuk bangkit melestarikan kualitas feminim agar dominasi sistem maskulin dapat di imbangi sehingga kerusakan alam, degradasi moral yang semakin mengkhawatirkan dapat di kurangi (Harien, 2013).

Menurut Agus (2017) membagi ke dalam dua teori yang menyoalkan peran laki-laki dan perempuan yang keduanya saling berlawanan. Teori *nature* dan *nurture*, teori *nature* yang di landasi oleh pemikiran biologis dan teori fungsionalisme struktural mencoba menjelaskan bahwa perbedaan peran gender bersumber dari perbedaan biologis laki-laki dan perempuan. Namun berlawanan oleh teori *nurture* yang di landasi teori konflik, mengibaratkan bahwa perbedaan peran gender antara laki-laki dan perempuan bukan hanya merupakan konsekuensi dari perbedaan biologis kodrati, tetapi lebih muncul sebagai hasil dari generalisasi manusia, pembentukanya hanya sangat di pengaruhi oleh kondisi sosial dan kultural yang selalu melingkupinya.

Teori *nature* merupakan pengandaian bahwa peran laki-laki dan perempuan adalah peran yang digariskan oleh alam. Munculnya teori ini, bisa disebut diilhami oleh sejumlah teori filsafat sejak era kuno. Dalam kajian filsafat Yunani Kuno misalkan, dinyatakan bahwa alam dikonseptualisasikan dalam pertentangan kosmik yang kembar, misalnya siang malam, baik buruk, kesinambungan-perubahan, terbatas tanpa batas, basah kering, tunggal ganda, terang gelap, akal perasaan, jiwa raga, laki perempuan dan seterusnya. Dengan demikian pula ada dua entitas yang selalu berlawanan berada pada titik eksistensial yang simetris dan tidak berimbang. Dalam hal ini kelompok pertama selalu dikonotakan secara positif dan dikaitkan dengan laki-laki, sementara kelompok kedua berkonotasi negatif yang selalu dikaitkan dengan perempuan (Agus, 2017).

Plato juga sedikit memberikan tempat bagi perempuan, dengan menyebut bahwa perempuan memiliki jiwa laki-laki yang rendah dan pengecut. Kendati memposisikan perempuan rendah, namun ia masih menyisakan tempat bagi perempuan untuk menembus kesejatian laki-laki. Menguatkan teori *nature* tentang laki-laki dan perempuan, Aristoteles juga mendukung pendapat Plato tentang dikotomi jiwa raga, dengan anggaoan ketidak setaraan di antara manusia sebagai sesuatu yang alami dan bahwa yang kuat harus mendominasi yang lemah. Selanjutnya Aristoteles juga melembagakan penolakan kewarganegaraan perempuan dalam negara kota, yang pada saat itu mulai berkembang (Agus, 2017).

Plato melihat dunia sebagai proses oposisi serupa yang tiada hentinya, Aristoteles juga mengandaikan bahwa dualisme hierarkis yaitu oposisi kembar mengharuskan adanya dominasi satu pihak atas pihak lainnya. Jiwa mendominasi tubuh, akal mendominasi perasaan, laki-laki mendominasi perempuan dan seterusnya. Perempuan yang didefinisikan sebagai suatu yang ganjil, menyimpang dan prototipe manusia generik adalah budak-budak dari fungsi tubuh yang pasif dan emosional. Akibatnya perempuan lebih rendah dari laki-laki yang memiliki pemikiran aktif (Thomas, 2010).

Menurut Andian dalam Agus (2017) berdasarkan studi tentang *nurture* pendefinisian laki-laki yang dilakukan oleh masyarakat patriarki sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari tiga konsep metafisika yaitu, identitas dikotomi dan kodrat. Identitas merupakan konsep pemikiran klasik yang selalu mencari kesejatian pada identik. Segala sesuatu harus mempunyai identitas, memiliki kategorisasi dan terumuskan secara jelas. Aristoteles juga dikatakan sebagai bapak identitas, menyebutkan bahwa sesuatu tanpa identitas adalah mustahil.

Identitas itu terbentuk di mana saat kaum perempuan diidentikan dengan feminim, yaitu makhluk yang lemah lembut, keibu-ibuan. Sedangkan laki-laki adalah makhluk yang maskulin, yaitu makhluk yang gagah, kuat dan perkasa. Bahkan dalam agama-agama monoteisme menyatakan bahwa perempuan tercipta karena laki-laki (Agus, 2017).

Berdasarkan pemikiran Pythagoras meyakini bahwa tidak adanya kekuatan bagi Hawa untuk menahan emosinya ketika dibujuk syetan, mengakibatkan ia mudah digelincirkan syetan. Perempuan secara alamiah

memiliki sifat lebih terbuka kepada kesenangan fisik, membuat syetan berhasil menggodanya. Sehingga rasa rendah diri perempuan dianggap sebagai kaki tangan syetan (Agus, 2017).

2.1.2.2 Feminis Radikal

Feminis radikal melihat bahwa di dalam intitusi dan struktur masyarakat memiliki sistem penindasan di mana orang-orang tertentu mendominasi orang lain. Bentuk penindasan ini terjadi antara jenis kelamin, kelas, kasta, etnis, umur dan warna kulit. Dan struktur yang paling mendasar terdapat dalam sistem patriarki yaitu laki-laki menindas perempuan. Feminisme radikal berpendapat bahwa penindasan atas perempuan terutama terjadi karena citra perempuan diobjektifkan sehingga mereka di tindas (Ngangi, 2011).

Sex Politics karya Millet dalam Tong (2009), salah satu dari feminis radikal pertama yang bersikeras menyatakan bahwa akar operasi terhadap perempuan sudah terkubur dalam sistem patriarki seks dan gender. Millet berpendapat bahwa seks adalah politik, terutama kerana hubungan laki-laki dan perempuan merupakan paradigma dari semua hubungan kekuasaan. Kasta sosial mendahului semua bentuk inegraliterianisme, ras, politik, ekonomi, dan jika penerimaan terhadap supremasi laki-laki sebagai hak sejak lahir tidak dihilangkan. Semua sitem opresi akan terus berlangsung hanya atas mandat logis dan emosional dalam situasi manusia yang primer. Kerana kendali laki-laki di dunia politik dan privat menimbulkan patriarki, penguasaan oleh laki-laki harus

dihapuskan jika perempuan ingin mendapatkan kebebasan. Tapi ini bukanlah tugas mudah, untuk menghilangkan penguasaan oleh laki-laki perempuan dan laki-laki harus menghapuskan gender terutama status, peran, dan tempramen seksual sebagaimana itu dibangun di bawah patriarki.

Ideologi patriarki menurut Millet membesar-besarkan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, dan memastikan bahwa laki-laki selalu mempunyai peran yang maskulin dan dominan. Sedangkan perempuan selalu mempunyai peran yang subordinat, atau feminim. Ideologi ini begitu kuat, sehingga laki-laki biasanya mampu mendapatkan persetujuan dari perempuan yang mereka operasi. Mereka melakukan hal tersebut melalui institusi seperti akademi, gereja, dan keluarga yang masing-masingnya membenarkan dan menegaskan subordinasi perempuan untuk menginternalisasikan rasa inferioritas diri terhadap laki-laki. Haruskah perempuan menolak untuk menerima ideologi patriarki dan haruskah ia memmanifestasikan ketidakpercayaannya dengan menghilangkan feminitasnya. Misalnya sifat penurut/subordinasi yang akan dilakukan oleh laki-laki, untuk melakukan koersi guna mencapai apa yang gagal dilakukan oleh pengkondisian. Intimidasi menurut Millet ada di mana-mana di dalam budaya patriarki ia lebih baik bertindak feminis atau kalau tidak ia mungkin akan tersubjektifikasi terhadap beragam kejahatan dan barbarian (Tong, 2009).

Millet menekankan bahwa meskipun ada usaha terus menerus untuk mengkondisikan dan menkoersikan semua perempuan. Banyak perempuan terbukti tidak dapat dikendalikan. Selama tahun 1800 misalnya, resistensi perempuan Amerika seikat terhadap kekuasaan laki-laki lahir dalam berbagai

bentuk termasuk gerakan perempuan yang dimulai 1848 pada Seneca Falls, New York. Sebagaimana gerakan yang penuh semangat ini membantu perempuan mendapatkan banyak kebebasan ekonomi, politik, legal, dan kesetaraan. Gerakan perempuan tahun 1800 gagal ketika membebaskan perempuan secara penuh, kerana gerakan itu gagal untuk menentang sistem seks/gender di akarnya yang terdalam. Sebagai akibatnya, kekuatan patriarki abad 20 mampu merebut kembali pijakan yang telah hilang dari aktivis feminis abad 19 (Millet, 1968).

Millet menunjukan kepada Lawrence dan Henry Miller sebagai pemimpin patriarki yang paling banyak bersuara di tahun 1930-1960 dalam menyerang gagasan feminis. Mereka mengklaim bahwa pembaca menganggo gambaran Lawrence dan Miller mengenai hubungan yang di dalam hubungan itu, perempuan dipermalukan dan dianiaya secara seksual yang ideal, mereka cenderung menganggap diri mereka sendiri sebagai kegagalan seksual. Gagal untuk menyertakan diri dengan perilaku seksual dari karakter dalam tulisan Miller yang berjudul *sexus* misalnya dalam (Tong, 2009).

“Kamu tidak pernah memakai pakaian dalam kan? Kamu memang perempuan jalang, kamu tahu itu?”

“Aku angkat pakaiannya ke atas dan membuatnya duduk dalam posisi itu selama aku menghabiskan kopi.”

“Bermain-mainlah dengan (vaginamu) itu sambil aku menghabiskan ini.”

“Kamu memang jorok, katanya tetapi ia tetap melakukan perintahku.”

“Pakai dua jarimu dan bukalah, aku suka warnanya.”

“....setelah itu, kugapai sebuah lilin di atas meja rias di sisiku dan memberikanya kepadanya.”

“kita lihat apakah kau dapat mencapainya dengan cara...”

“Kamu dapat membuatku melakukan apa saja, dasar bajingan.”

Menjawab keberatan bahwa pembaca *sexus* dapat membedakan antara fiksi dan realitas, Millet mengatakan bahwa pornografi seringkali berfungsi dengan cara yang hampir sama dengan iklan. Tubuh langsing yang sempurna dari para model, yang memenuhi cover *vague*, menjadi standar bagi seluruh perempuan. Tidak seorangpun harus mengartikulasikan hukum yang eksplisit. “Diwajibkan atasmu untuk membentuk tubuh secitra deng Cindy Crawford”. Setiap perempuan tahu apa yang diharapkan darinya, apa artinya menjadi perempuan cantik. Dengan cara yang sama, setiap pembaca *sexus* mengetahui begitu saja apa yang diharapkan darinya, apa yang artinya menjadi seorang yang vital secara seksual (Tong, 2009).

Meskipun di tahun 1970 Millet menginginkan suatu masa depan yang androgin, suatu integrasi dari subkultur feminim dan maskulin yang selama ini terpisah. Millet bersikeras bahwa integrasi ini harus berlangsung secara hati-hati dengan evaluasi yang menyeluruh dari semua sifat maskulin dan feminim. “Kepatuhan” sebagaimana ditunjukkan secara tradisional oleh perempuan, misalnya seharusnya tidak dirayakan secara buta sebagai manusia yang harus disukai yaitu sebagai suatu sifat yang harus di terima sebagai hal yang positif. Dan karena itu, harus dimiliki oleh manusia androgin. Androgini menurut Millet hanya menjadi idea jika kualitas feminim dan maskulin yang di integrasikan ke dalam manusia androgin adalah masing-masing berharga. Bagaimanapun juga kita diberitahukan bahwa manusia menggabungkan arogansi maskulin dan kepatuhan feminim, kita kurang terkesan dibandingkan jika kita diberitahu bahwa manusia

yang ideal mengkombinasikan kekuatan yang secara tradisional dihubungkan dengan laki-laki dan kelembutan yang secara tradisional dihubungkan dengan perempuan (Tong, 2009).

2.1.3. Budaya Patriarki

Perempuan menggelar aksi demo memiliki keterlibatan yang aktif di bidang politik namun masih ada pemisahan dalam keikutsertaan dan keterwakilan perempuan di struktur politik formal. Penggambaran politik perempuan cukup penting jika menempatkan demokrasi yang peduli gender. Saat orde lama dan orde baru partisipasi perempuan mengalami naik turun, sedangkan pada era reformasi, keikutsertaan perempuan mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan kualitas demokrasi yang berorientasi kesejahteraan rakyat, perlu kesinambungan peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik di lembaga legislatif (Nurchahyo, 2008).

Hubungan di antara laki-laki dan perempuan merupakan isu yang tidak ada habisnya di bahas. Formn menyatakan di dalam Nurchahyo (2008) menjelaskan bahwa pertentangan yang terjadi antara relasi kedua jenis kelamin ini telah berlangsung sejak enam ribu tahun lalu. Persoalan menjadi sangat memanas jika dalam hubungan ini terjadi ketimpangan dan terdapat relasi subordinat. Pola penentangan atas kekuasaan laki-laki tidak terlepas dari sistem patriarki yang tidak adil, dan menepatkan perempuan sebagai lapisan kedua laki-laki (Nurchahyo, 2008).

Kata patriarki kini menunjukkan pada sistem budaya dalam arti sistem kehidupan di atur oleh sistem kebapakan. Patriarki atau *patriarkiat* menuju pada lapisan masyarakat mengikuti garis bapak. Ini adalah istilah yang menunjukkan ciri-ciri tertentu pada hubungan keluarga atau kumpulan keluarga, manusia yang di atur , dipimpin, dan di perintah oleh kaum bapak atau laki-laki tertua. Jelasnya, hukum keturunan dalam patriarkiat menurut garis bapak. Nama, harta milik, dan kekuasaan kepala keluarga di wariskan kepada anak laki-laki (Yogie, 2013).

Yogie (2013) juga menjelaskan istilah itu secara umum digunakan untuk menyebut kekuasaan laki-laki. Khususnya hubungan kekuasaan antara laki-laki terhadap perempuan yang di dalamnya melakukan dominasi laki-laki atas perempuan yang di wujudkan melalui bermacam-macam cara dan media. Sistem patriarki ini menjadi cara pandang yang berlaku di masyarakat. Sehingga otomatis kaum perempuan tidak terepresentasikan dalam cara pandang seperti ini. Jika di lihat, sistem budaya patriarki seakan-akan sudah menjadi alamiah dari asalnya. Oleh sebab itu, pandangan yang beranggapan bahwa kaum perempuan secara kodrati memang lebih lemah dari kaum laki-laki juga seakan-akan merupakan cara pandang yang diberikan.

Masyarakat patriarki sejak dahulu menganggap bahwa laki-laki lebih kuat dibandingkan perempuan baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan bernegara. Perbedaan biologis diantara keduanya merupakan status yang tidak setara. Perempuan yang tidak mempunyai otot dijadikan alasan mengapa masyarakat menempatkan mereka pada posisi lemah. Hampir di bidang politik di dominasi kaum laki-laki. Perempuan tidak ada di dalamnya, seolah-olah ada

anggapan bahwa dunia ublik bukan dunianya. Karena sifatnya yang mengandung ketidak jujuran, kekerasan, dan tipu daya. Stereotip peran seksual yang ada menjabarkan bahwa politik adalah dunia laki-laki. Jika membicarakan persoalan politik perempuan, tidak akan bisa mengartikan politik secara sempit seperti melihat politik dalam kaca mata formal di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Oleh sebab itu, aspek kehidupan bersama pada tingkat lokal maupun kepekaan terhadap permasalahan yang ada merupakan eksistensi politik (Nurchahyo, 2008).

Murniati dalam Nurchahyo (2008) mencoba mendefinisikan sebagai suatu system laki-laki yang berkuasa untuk menentukan segala sesuatu yang akan dilakukan atau tidak dilakukan. Sitem ini di anggap wajar kerena kebenarannya di sejajarkan dengan pembagian kerja berdasarkan seks atau jenis kelamin dan bukan berdasarkan gender. Di samping itu Muniarti juga menjelaskan, ada keyakinan definisi tersebut adalah kelompok miskin, lemah, rendah, tidak berdaya, juga lingkungan hidup dan perempuan. Dalam budaya itu, negara yang menggunakan budaya patriarki disebut patriarkis.

Saraswati mengatakan dalam Nurchahyo (2008), bahwa patriarkis adalah negara yang mempromosikan dan memelihara praktek-praktek yang secara langsung dan sistematis menindas perempuan. Penindasan perempuan di lihat dari struktur keluarga dan rumah tangga serta kebijakannya yang di terapkan pada kedua bidang tersebut. Biasanya, kebijakan tersebut bersifat diskriminatif, atau menghambat status kebebasan dan ekonomi bagi perempuan.

Lebih lanjut Agus (2017) menjelaskan kelemahan-kelemahan perempuan akibat budaya patriarki adalah perempuan kurang menyadari bahwa dirinya adalah seorang pribadi yang mempunyai hak-hak azasi manusia yang sama. Perempuan seringkali kesulitan menghilangkan perasaan malu dan perasaan takut salah. Perempuan kurang mampu berpikir jernih dan logis, sehingga sulit dalam mengambil keputusan. Perempuan memiliki beban kerja domestik sumur, kasur dan dapur. Perempuan selalu mempertimbangkan faktor, faktor keluarga, atau tradisi turun temurun keluarga yang aktif berorganisasi. Perempuan selalu mempertimbangkan faktor agama. Perempuan selalu mempertimbangkan faktor ekonomi. Perempuan kurang dapat menerima kekuasaan yang di percayakan dan dalam merebut kekuasaan lebih suka mengalah. Perempuan kurang mampu mengendalikan emosi, sehingga pikirannya kurang stabil dan mudah terpengaruh. Perempuan tidak mampu menjalin persatuan yang solid, sehingga mudah bercerai bera dan sukar menyatukan pandangan.

Rezim orde baru telah membentuk kementerian khusus menangani masalah perempuan. Secara normatif, perempuan ikut berperan di bidang sosial maupun politik. Meskipun begitu, orientasi politik orde baru tetap menyuburkan pola politik *patron-client* dan kultur hegemoni politik laki-laki. Masuk di era reformasi, Menteri Negara Pemberdayaan perempuan terutama di era kepemimpinan Khofifah Indar Parwansah mengangkat isu kesetaraan gender sebagai *mainstream*. Namun, kerja keras para aktivis dan berbagai organisasi perempuan di Tanah Air untuk mewujudkan persamaan hak tetap saja terbentur oleh budaya patriarki dan praktik politik anti partisipasi. Oleh karena dalam

struktur masyarakat patriarkis, konstruksi sosial dan budaya perempuan kerap dipakai sebagai alat legitimasi kekuasaan (Nurcahyo, 2008).

Budaya patriarki dan nilai-nilai sosial di Indonesia menuntut perempuan untuk tidak berpartisipasi di ranah politik manapun pemerintahan. Politik dianggapnya wilayah istimewa laki-laki. Kendala yang bisa di hadapai oleh perempuan adalah peran, tanggungjawab domestik, status subordinasi dalam hubungan gender serta perilaku sosial yang bersifat patriarkis. Perempuan kurang siap menjealakan peran publiknya. Umumnya mereka bukanlah pengambil keputusan, baik di bidang sosial, ekonomi dan politik. Apalagi sebagian besar masyarakat berpandangan bahwa laki-laki harus menjadi pengambil keputusan dan pemimpin di kalangan masyarakat. Selain itu, laki-laki harus menjadi kepala rumah tangga. Dan sebaliknya, masyarakat menyatakan bahwa perempuan tidak boleh bekerja tanpa ijin dari suami mereka. Temuan dalam survey itu menunjukkan bahwa bias gender dalam pengetahuan dan perilaku masyarakat keseharian tetap eksis. Oleh karena adanya bias sosio-budaya, perempuan tertinggal dalam mengakses sumber daya produktif, misalnya tanah, kredit, aset, materiil, pengembangan keterampilan dan lain-lain. Perempuan juga mengalami kekuarangan dalam hal modal, karena mereka bukanlah pemimpin dan tidak memiliki basis kekuasaan yang mandiri (Nurcahyo, 2008).

Sistem dan arah kebijakan pemerintah terhadap isu perempuan kian responsif gender. Namun demikian, posisi perempuan tetap rentan terhadap berbagai bentuk manipulasi politik yang sering di pakai sebagai alat legitimasi. Asumsinya, perempuan sebagai unit pertama kehidupan keluarga dan masyarakat.

Kontrol atas peran perempuan merupakan sarana efektif dalam mengendalikan seluruh kekuasaan negara. Sementara bagi Fatimah Muhibbi dalam Nurcahyo (2008) feminis muslim Iran, perbedaan fisik perempuan dan laki-laki merupakan fakta yang tidak bisa di tolak. Namun jika perbedaan itu di bingkai dalam konstruksi budaya yang bias gender apalagi jika di bingkai dalam ayat-ayat agama, maka definisi persamaan hak atas dasar klaim perbedaan alamiah itu akan kembaliberujung pada ekspresi dan dominasi politik patriarki. Secara substantif juga bertentangan dengan hukum tuhan dan prinsip keadilan universal.

Berbagai regulasi negara menyangkut isu perempuan membuktikan bahwa konstruksi budaya politik patriarki sepanjang sejarah amat menentukan kehidupan perempuan. Sejak tahun 1960 gerakan feminisme menggeliat di berbagai belahan dunia. Termasuk di Indonesia para aktivis pada tahun 1990 terus menggugat dasar kebijakan negara yang bias gender. Mereka boleh mendorong peran, fungsi dan posisi perempuan secara lebih progresif, serta memprotes berbagai kebijakan konservatif. Diantaranya negara dan stigma masyarakat yang memarjinalisasi aspirasi hak, dan kepentingan perempuan (Nurcahyo, 2008).

Menurut Gadis Arivia kaum feminis yang peduli pada pentingnya kesetaraan gender dalam membangun watak bangsa, menuntut perubahan yang progresif atas posisi perempuan. Hal ini tercermin dalam polemik isu poligami, isu kekerasan dalam rumah tangga, isu hak-hak reproduksi perempuan atau isu pereaturan daerah tentang prostitusi. Hampir seluruh regulasi negara yang terkait dalam soal perempuan mengandung materi bias gender. Sebab dalam struktur

masyarakat patriarkis, konstruksi sosial budaya perempuan kerap digunakan sebagai alat legitimasi politik (Agus, 2017).

Legitimasi ini terlihat dari sikap masyarakat yang sering menempatkan seksualitas perempuan sebagai komoditas, alat pemuas hasrat seksual laki-laki. Dalam kekuasaan struktur patriarkis, politik bukan hanya refleksi dari interest kekuasaan dan uang, tetapi juga seks. Kuasa politik bukan Cuma membuat para aktornya menjual banal/politik haus kuasa, tapi juga binal/tapi juga syarat syahwat (Tong, 2009).

Kegiatan ini terbongkar saat kasus mesum politisi DPR di atas, kemerosotan moral politik di level elit bukan hanya ditandai oleh binalitas politik tapi juga binalitas manusia yang kian menunjukkan watak dasarnya sebagai *homp sexus*. Lebih dari itu, mesum DPR kian membuat argumen bahwa posisi perempuandi negri ini masih berada di bawah kekokohan dominasi budaya politik patriarki. Kaum feminis yang menganut paham pluralisme demokratis menyakini bahwa perempuan tidak bisa dirugikan hanya denga jenis kelaminya. Sebagai manusia, perempuan juga butuh pengakuan atas eksistensi keperempuannya. Gerakan feminis menentang padangan stereotipe yang berpotensi memarjinalisasi peran perempuan sebatas fungsi domestiknya, bukan dalam konteks kehidupan publik yang lebih luas.

Namun demikian, telah terjadi kesala fahaman mengenai gender, di mana kaum feminis/perempuan diartikulasikan lebih inferior dari kaum maskulin. Perlu juga di ketahui bahwa istilah gender sesungguhnya tidak ada dalam bahasa indonesia. Dan dalam kamus bahasa Inggris, kata *gender* dan *sex* di artikan

sebagai jenis kelamin. Sehingga perlu di jelaskan tentang kaitan antara konsep gender dengan sistem ketidakadilan sosial secara luas, dan hubungannya dengan persoalan ketidakadilan sosial lainnya (Agus, 2017).

Gender adalah konsep mendasar yang di gagas oleh kaum feminisme untuk menganalisis masyarakat. Pemakaian kata gender dalam feminisme pertama kali dicetuskan oleh Anna Oakley. Anna Oakley berusaha menggiring opini warga dunia untuk memahami bahwa sesungguhnya ada dua istilah yang serupa tapi tidak sama, yaitu *sex* dan *gender*. Pengetahuan yang di miliki oleh masyarakat selama ini terhadap kedua istilah tersebut sama saja, yaitu sebagai sesuatu yang harus diterima secara *taken for granted* (menganggap sudah semestinya). Padahal ketika berbicara mengenai perubahan sosial di masyarakat (proses-proses konstruksi, dekonstruksi, dan rekonstruksi) membutuhkan pemahaman yang lebih tentang mana wilayah yang bisa di ubah dan mana wilayah yang bisa di terima begitu saja, atau dengan istilah lainnya, perlu adanya pemahaman bahwa di dalam kehidupan ini ada wilayah *nature* dan ada wilayah *culture*, (Agus, 2017).

Pula Gina Lollobrigida dalam (Agus, 2017) menyebutkan dalam hal mengenai kesamaan derajat wanita, ia berpendapat “kaum pria perlu memahami kaum wanita sebagaimana adanya. Jadi wanita haruslah di perlakukan secara manusiawi dan sejajar dengan kaum pria”. Diskriminasi gender sudah terjadi pada seluruh aspek kehidupan, di seluruh dunia. Ini adalah fakta meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender sampai saat ini. Sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi di berbagai negara atau wilayah. Tidak ada satu wilayahpun di negara dunia ketiga di mana perempuan telah menikmati

kesetaraan dalam hak-hak hukum, sosial dan ekonomi. Kesenjangan gender dalam kesempatan dan kendali atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik terjadi dimana-mana. Perempuan dan anak perempuan menanggung beban paling berat akibat ketidak setaraan yang terjadi namun pada dasarnya ketidak setaraan itu merugikan semua orang.

Hal ini mengingatkan kembali pada ideologi patriarki yang menjadikan perempuan sebagai masyarakat yang termajinalkan. Ideologi patriarki merupakan salah satu dari ideologi hegemoni, yaitu landasan pemikiran yang membenarkan kekuasaan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Dominasi kekuasaan seperti ini akan terjadi antar lapisan masyarakat berdasarkan perbedaan antara jenis kelamin, agama, ras, atau kelas ekonomi. Beberapa asumsi penting yang mendasari ideologi ini, Pyke dalam Darwin, (1999) termasuk kesepakatan-kesepakatan sosial, yang berarti sesungguhnya hanya mementingkan kelompok yang dominan. Dan cenderung di anggap mewakili kepentingan semua orang.

Ideologi patriarki seperti ini merupakan bagian dari pemikiran sehari-hari, seakan-akan di terima apa adanya (*taken for granted*) sebagai suatu yang memang demikianlah terjadi begitu saja. Dengan mengabaikan kontradiksi yang sangat nyata antara kepentingan kelompok yang dominan dengan kelompok subordinat, ideologi seperti ini dianggap sebagai penjamin kohensi dan kerjasama sosial. Sebab jika tidak demikian yang akan terjadi justru suatu konflik.

Katika hubungan antar individu didominasi oleh ideologi patriarki, kelompok yang termajinalkan tidak akan memiliki cukup ruang yang memadai untuk mengoptimalisasikan seluruh kekuatan atau potensi diri yang dimiliki, dan

memenuhi secara optimal semua keinginan dan harapan-harapannya. Tata masyarakat juga diatur menurut ideologi patriarki yang menimbulkan problematika. Lalu kemudian muncul proses untuk menata ulang masyarakat kedalam pola hubungan yang disebut egalitarian yang tidak membedakan seseorang dari latar belakang seks, ras, agama, dan kelas ekonomi (Darwin, 1999).

Partisipasi perempuan saat ini bukan hanya menuntut persamaan hak, tetapi juga menyatakan fungsinya terhadap pembangunan dalam tatanan masyarakat. Melihat potensi perempuan sebagai sumberdaya manusia, maka upaya yang dilakukan perempuan untuk turut menyertakan perempuan dalam pembangunan bukan hanya merupakan prike-manusiaan berkala. Tetapi merupakan tindakan tepat, karena tanpa mengikut sertakan perempuan dalam proses pembangunan berarti memberi pengaruh negatif terhadap lajunya pertumbuhan ekonomi (Wibowo, 2011).

Kedudukan perempuan di sektor domestik mencangkup peran perempuan sebagai istri, ibu dan pengolah rumah tangga. Peran perempuan di ranah domestik atau rumah tangga di sebabkan oleh faktor ekonomi dalam keluarga. Sering di jumpai bahwa penghasilan suami yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam keluarga mereka. Hal itulah yang membuat perempuan tergerak untuk berperan dalam ranah publik. Menurut Beinar dalam Ruswaningsih (2011), mengungkapkan bahwa perkembangan zaman dan kondisi sosial ekonomi kadang kala menyebabkan peranan seorang perempuan bukan lagi hanya semata-mata sebagai ibu rumah tangga, melainkan juga sebagai perempuan karir atau pekerja.

Kedudukan perempuan di ranah publik menurut Stoler dalam Ruswaningsih, (2011) peran perempuan di ranah publik berlandaskan pada motivasi yang sangat beragam, dan juga beragam stigma negatif. Perempuan di muka publik ada karena terdorong untuk menegakan ekonomi rumah tangganya atau mempertahankan asap dapur. Seperti yang di bahas oleh Tong dalam Thomas (2010) menjadi istri yang keseharian di dalam rumah adalah dua peran feminim yang membatasi kebebasan perempuan. Tetapi hal yang sama juga berlaku bagi peran perempuan yang berkegiatan pada ranah publik.

Meskipun Indonesia salah satu Negara yang sudah mengenal paham feminisme, tetapi tetap saja tradisi patriarki atau paham patriarki masih kental di budaya Indonesia. Keberhasilan pejuang feminis dalam tuntutan demokrasi agar semua warga negara penyelenggara pemerintahan yang lebih baik mengharuskan keikutsertaan perempuan di segala bidang. Perempuan memulai memprogramkan dirinya untuk tampil di ranah publik. Eksistensi wanita yang di harapkan adalah wanita memenuhi kodratnya dengan melakukan kegiatan yang merupakan bagian dari tugasnya seperti terhadap anak dan suami. Dengan tersalurnya potensi wanita secara kodrati dan fitri baik fisik, afektif atau kemampuan, ketrampilan dan minatnya akan mengantarkan wanita untuk mengoptimalkan eksistensinya ke arah yang lebih positif (Uma, 2002).

Menurut Uma feminis berarti upaya untuk meningkatkan kedudukan serta derajat kaum wanita agar setara atau sama dengan laki-laki. Pada akhirnya wanita dapat menunjukkan tokoh citra wanita yang kuat dan mendukung nilai-nilai feminisme. Lanjut lagi Goofe dalam (Uma, 2002) juga menyatakan bahwa

feminisme adalah teori tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan yang memperjuangkan kepentingan dan hak-hak perempuan.

Pengertian luas feminisme di definisikan sebagai gerakan kaum perempuan untuk menolak segala sesuatu yang termarginalisasikan, disubordinasikan serta di rendahkan oleh kelompok dan budaya yang dominan baik di bidang ekonomi dan politik maupun kehidupan sosial pada umumnya. Tong (2009) juga menambahkan bahwa feminis berkeinginan untuk membebaskan perempuan dari peran gender yang operesif, yaitu dari peran-peran yang digunakan sebagai alasan atau pembenaran untuk memberikan tempat yang lebih rendah, atau tidak memberikan tempat sama sekali. Bagi perempuan baik di dalam akademis, forum maupun pasar, mereka menekankan bahwa masyarakat patriarki mencampuradukan *sex* dan *gender*. Dan menganggap hanya pekerjaan-pekerjaan yang dihubungkan dengan kepribadian feminim yang layak untuk perempuan. Karena itu, di Amerika Serikat misalnya perempuan di dorong untuk melakukan pekerjaan seperti perawat, guru, dan pengasuh anak dan undang-undang secara khusus melarang perempuan dari pekerjaan-pekerjaan maskulin.

Dari sekian banyak pergerakan feminis, menurut Hilary (2005) feminis terbagi dari beberapa pokok besar yaitu *feminisme liberal*, *feminisme radikal*, dan *ekofeminisme*. Para filsuf feminsis liberal Alison Jaggar dalam Tong (2009) mengamati bahwa konsep feminisme liberal timbul akibat hak-hak perempuan tidak lagi diberikan. Ia mengatakan bahwa “hak” harus diberikan sebagai prioritas di atas “kebaikan”, dengan kata lain keseluruhan sistem atas hak individu dibenarkan karena hak ini menghasilkan bingkai kerja yang merupakan dasar bagi

kita tidak merapas hak orang lain. Prioritas seperi itu membela kebebasan beragama, misalnya yang tidak berdasarkan pada apa yang akan meningkatkan kesejahteraan bersama, atau dengan alasan bahwa kehidupan yang tak bertuhan. Tetapi hanya karena alasan bahwa manusia mempunyai hak untuk melaksanakan spritual yang diinginkanya. Hal yang sama berlaku bagi hak-hak lain yang biasanya digeneralisasikan sebagai fundamental (Tong, 2009).

Konsep feminisme radikal berkembang akibat dari ideologi patriarki yang membesar-besarkan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Menurut Millet (1968) ia memastikan bahwa laki-laki selalu mempunyai peran yang maskulin dan dominan, sedangkan perempuan selalu mempunyai peran yang subordinat atau feminim. Ideologi ini begitu kuat, hingga laki-laki biasanya mampu mendapatkan persetujuan dari perempuan yang mereka opresi. Mereka melakukann hal tersebut melalui institusi seperti akedemi, gereja dan keluarga. Dengan masing-masingnya membenarkna dan menegaskan subordinasi perempuan terhadap laki-laki. Dan berakibat bagi banyak perempuan untuk menginternalisasikan rasa inferior diri terhadap laki-laki.

Seperti feminisme liberal dan radikal, ekofeminisme berusaha untuk menunjukkan hubungan antara semua bentuk operasi manusia. Tapi juga memfokuskan hubungan pada usaha manusia untuk mendominasi dunia bukan manusia atau alam. Karena perempuan secara kultural dikaitkan dengan alam, ekofeminis berpendapat ada hubungan konseptual, simbolik dan linguistik antara feminisme dan isu ekologi. Menurut Karen Warren dalam Tong (2009) keyakinan, nilai, sikap, dan asumsi dasar dunia Barat atas dirinya sendiri dan orang-orangnya

dibentuk oleh bingkai pikir konseptual patriarki yang opresif, yang bertujuan untuk menjelaskan, membenarkan dan menjaga hubungan antara dominasi dan subordinasi secara umum serta dominasi laki-laki terhadap perempuan.

Dengan keadaan manusia seperti yang sudah di jelaskan Karen Waren, eko feminis bertanya apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh manusia untuk menyadari betapa tidak rasional dan tidak berperasaan sistem opresi dan dominasi manusia. Sistem ini membangkitkan kebencian, kemarahan, kerusakan, dan kematian meskipun demikian manusia masih saja berpegang teguh pada konstruksi sosial yang ada. Apakah jalan keluar untuk situasi seperti manusia adalah dengan menciptakan suatu kebudayaan yang membuat semua lapisan menghargai perempuan dan alam sebagai sejenis penyelamat (Tong, 2009).

Lain dengan di Indonesia, pergerakan feminis muncul karena berbagai kasus pornografi dan pencekalan-pencekalan perempuan yang sedang mengekspresikan dirinya. Kasus yang paling ramai dikaitkan dengan eksploitasi seksual dan pornografi dan paling banyak menarik perhatian publik adalah tarian yang dilakukan oleh Inul Daratista yang di anggap oleh sekelompok orang dan organisasi goyangan Inul merupakan suatu bentuk erotisme dan mengarah pornografi. Sementara pandangan feminisme menganggap dan membela tarian inul sebagai bentuk kebebasan ekpresi. Pelanggaran inul dianggap pelanggaran hak asasi manusia, dalam hal ini pelanggaran akan kebebasan berekpresi (Ahmad, 2012).

Dalam feminisme, pornografi menjadi perdebatan yang belum selesai. Kelompok feminisme radikan lebertarian membela pornografi sebagai upaya

kebebasan ekspresi perempuan yang selama ini terkekang. Sementara itu kelompok ekofeminisme menolak pornografi karena hal ini dianggap sebagai sebuah eksploitasi dan pelembagaan ideologi patriarki (Ahmad, 2012).

2.1.4. Konsep Komodifikasi

Moscow menjelaskan dalam "*the political economy of communication*" bahwa pengertian politik dan ekonomi merupakan "*the study of relations, particularly the power relation, that mutually constitute the productions, distribution, and consumption of resources*". Vincent Moscow menjelaskan komodifikasi sebagai proses merubah nilai guna kemudian menjadi nilai tukar dimana nilai kebutuhan individual dan sosial pada produk ini ditentukan lewat harga yang memang sudah dirancang oleh produsennya. Jika semakin mahal harga suatu produk akan menunjukkan bahwa kebutuhan sosial dan individual atas produk semakin tinggi pula. Dalam konsep komodifikasi Vincent Moscow menyebutkan juga bahwa komunikasi arena potensial tempat terjadinya proses pengkomodifikasi. Pada hal ini, dikarenakan juga komunikasi adalah komoditas yang sangat luas dampaknya karena yang terjadi bukan hanya saja komodifikasi untuk mendapatkan *value*, tapi juga karena pesan yang disampaikan mengandung citra dan simbol yang akan dimanfaatkan untuk mempertajam kesadaran (Susanti & Rochman, 2016)

Menurut Adorno dan Marx Horkheimer pada tulisanya "*the culture industry enlightenment as mass deception*", mempunyai pandangan yang tidak

sama, kemunculan konsep komodifikasi karena perkembangan suatu industri dari budaya. Komodifikasi di artikan sebagai produk benda budaya, dimana pada komodifikasi didefinisikan sebagai produk benda budaya. Produksi secara massal oleh industri budaya karena menghasilkan produk budaya yang tidak otentik atau palsu, manipulasi dan terstandarisasi (Yulianti, 2016).

Komodifikasi sendiri dijelaskan dalam (Susanti & Rochman, 2016) bahwa dunia kapitalis merupakan penciptaan ilusi dan manipulatif sebagai cara mendominasi selera masyarakat yakni dengan penggunaan kelompok perempuan melalui politik manipulatif perempuan. Pada hal tersebut peran perempuan sangat besar bahkan terdapat diskursus bahwa perempuan dapat menjadi faktor utama dalam mencapai kekuasaan di negara demokrasi. Sebuah pertarungan demokrasi tak bisa lagi di rancang secara normatif. Artinya, jika adanya sentuhan-sentuhan komodifikasi seperti yang dijelaskan oleh Mosco.

Konsep komodifikasi merupakan teori yang dipengaruhi oleh pandangan Marxisme. Pada pandangan Marx, komodifikasi merupakan sebagai alat dari kapitalis untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan menghidap nilai surplus menghasilkan materi atau sesuatu yang mengandung nilai guna tukar yang disebut komoditas. Dasar semua karya Marx tentang struktur sosial dan tempat dimana karya-karya tersebut sangat jelas berhubungan dengan pandangan-pandangannya tentang produk kerja yang terutama dimaksudkan untuk dipertukarkan. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh George Lukas persoalan komoditi adalah pusat persoalan kultur masyarakat kapitalis. Dengan

memulainya komoditas, marx mampu mengungkap hakikat kapitalisme (Susanti & Rochman, 2016).

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam artikel yang berjudul *Kotruksi Maskulinitas dalam Teks Media : Analisis Wacana Maskulinitas dalam Berita Pemerkosaan di Situs Berita Online* Susilo (2015). Menjelaskan bagaimana media menganggap dirinya benar dan menjadi dalil dalam mengeksploitasi seksualitas wanita demi kepuasan pembaca laki-laki. Maskulinitas di gambarkan sebagai pemilik kuasa dalam bingkai tindakan perkosaan. Dari situs berita online, tindakan perkosaan sebagai bentuk gambaran dominasi maskulinitas atas feminitas. Berita online yang selalu mengedepankan kecepatan postingan berita, menggunakan banyak sumber daya yang dikuasai agar melancarkan proses konstruksi tersebut. Hasil penelitian Susilo menyatakan bahwa situs berita online telah mengkonstruksi maskulinitas sebagai keistimewaan laki-laki dalam berita perkosaan. Selain itu postingan berita online menguatkan pandangan “oposisi biner” terhadap perempuan, yakni “perempuan baik-baik” dan “perempuan tidak baik-baik” melalui elemen-elemen dan sumber daya media yang dikuasainya.

Terdapat beberapa variabel yang sesuai dengan penelitian ini. Penulis menggunakan majalah Hukum dan Politik Keadilan Indonesia sebagai obyek penelitian. Sedangkan Susilo menggunakan media online (tribunnews.com, merdeka.com dan JPNN.com) sebagai objek penelitian. Perbedaan objek

penelitian hanyalah berupa media cetak dan media online. Namun pada hakikatnya memiliki persamaan kegunaan yaitu menyampaikan pesan pada publiknya. Metode penelitian deskriptif kualitatif, Susilo menggunakan model analisis wacana kritis oleh Van Dijk yang di amati melalui tematik, skematik, semantik, sintaksis, stilistik dan retorik. Sedangkan penulis menggunakan metode analisis dari analisis wacana Sarah Mills yang di amati melalui subyek dan obyek.

Heny & Surwati, (2016) dalam artikelnya yang berjudul *Konstruksi Feminisme dalam Film Indonesia (Analisis Wacana Kritis Konstruksi Feminisme dalam Film Indonesia Karya Sutradara Nia Dinata)*. Menjelaskan bagaimana film-film karya Nia Dinata membangun persepsi mengenai konstruksi feminisme. Hasil penelitian mereka menyatakan bahwa, film sebagai produk budaya massa semakin menampilkan hal-hal yang mampu mendorong timbulnya konstruksi yang subjektif terhadap konsep feminisme. Selain itu, film-film yang menjadi objek dalam penelitian Heny yang di sutradari oleh perempuan sehingga unsur subjektifitas masih dimungkinkan mempunyai peranan dalam rangka melakukan konstruksi konsep feminisme.

Terdapat beberapa persamaan penelitian yaitu sama-sama menggunakan metode analisis dari Sarah Mills. Dengan mengedepankan pandangan feminisme dan menganalisis melalui obyek dan subyek. Perbedaan penelitian Heny dan penelitian penulis ialah antara film-film karya Nia Dinata, sedangkan penulis memiliki obyek penelitian media cetak majalah Politik dan Hukum Keadilan Indonesia. Penelitian dengan pandangan feminisme dari Heny memiliki

persamaan pada penelitian penulis. Mengedepankan kesetaraan kaum laki-laki dan perempuan di media massa.

Menurut penelitian Hasri (2014), *Analisa Framing Pemberitaan Media Terhadap Perempuan Koruptor (Analisa Pembingkai Kasus Korupsi Angelina Sondakh pada Sampul Majalah Tempo)* menyimpulkan bahwa majalah tempo mendefinisikan yang di hadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini masalah korupsi yang serius. Budaya korupsi dan sulitnya pemberantasan korupsi tidak bisa dilepaskan dari pengaruh Negara dan kekuasaan. Dan juga pada masalah moral, majalah tempo juga merepresantasikan Angelina Sondakh dengan gaya metaphor sebagai mana mirip Cathrine Tramell di fillm “*Basic Instinct I*” juga di gambarkan sebagai perempuan cantik dan pintar dalam artian sebenarnya, juga pintar berbohong.

Perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian Hasri (2014) menggunakan model analisis *framing* atau bingkai. Sedangkan penelitan penulis menggunakan model analisis wacana / *discourse analysis*. Analisis *framing* hanya menggunakan penggambaran pada suatu objek yang di teliti sedangkan analisis wacana atau *discourse analysis* menggunakan bahasa dalam teks untuk di analisis. Tapi bahasa yang dianalisis di penelitian ini agak berbeda dengan studi bahasa dalam pengertian linguistik. Dan persamaan penelitian ini ialah sama-sama menggunakan perempuan sebagai obyek penelitian.

Dalam artikel yang berjudul *Konstruksi Teks Pada Media Kompas dalam Pemberitaan Kasus Setyanovanto* dari Rahayu (2018), menyimpulkan bahwa pemberitaan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Setyanovanto tersebut telah

mengundang perhatian banyak publik, di karenakan dari peran media yang secara terus menerus memberitakan kasus korupsi e-KTP. Perbedaan pada penelitian ini adalah pada bagian pemberitaan media yang di pakai. Penelitian dari Rahayu (2018) menggunakan teks pada media Kompas, sedangkan penelitian penulis menggunakan teks pada pemberitaan politik emak-emak militan pada majalah Hukum dan Politik Keadilan Indonesia.

Dalam artikel yang berjudul *Gender Difference in Psychological Well-being among Filipino College Student Samples* dari (Perez, 2012), menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan gender dalam hal pengalaman spiritual sehari-hari, hubungan dengan ayah, hubungan dengan teman sebaya, otonomi, hubungan positif dengan orang lain dan tujuan hidup. Tidak ada perbedaan gender yang ditemukan dalam aspek pengaruh positif, pengaruh negatif, hubungan ibu, hubungan guru, penguasaan lingkungan, pertumbuhan pribadi dan penerimaan diri. Perbedaan penelitian dari Perez (2012) dengan penelitian ini adalah metodologi penelitian yang perez pakai adalah kuantitatif yang mempunyai sampel 588 mahasiswa dari berbagai universitas Filipina. Yang ikut partisipasi antara lain laki-laki 110 sampel dan perempuan 478 sampel.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan dan persamaan
1	(Susilo, 2015) <i>Kotruksi Maskulinitas</i>	Metode penelitian deskriptif	situs berita online telah mengkonstruksi	Terdapat beberapa variabel yang

<p><i>dalam Teks Media</i> : <i>Analisis Wacana</i> <i>Maskulinitas</i> <i>dalam Berita</i> <i>Pemeriksaan di</i> <i>Situs Berita</i> <i>Online.</i></p>	<p>kualitatif, Susilo menggunakan model analisis wacana kritis oleh Van Dijk yang di amati melalui tematik, skematik, semantik, sintaksis, stilistik dan retoris.</p>	<p>maskulinitas sebagai keistimewaan laki-laki dalam berita perkosaan. Selain itu postingan berita online menguatkan pandangan “oposisi biner” terhadap perempuan, yakni “perempuan baik- baik” dan “perempuan tidak baik-baik” melalui elemen- elemen dan sumber daya media yang dikuasainya.</p>	<p>sesuai dengan penelitian ini. Penulis menggunakan majalah Hukum dan Politik Keadilan Indonesia sebagai obyek penelitian. Sedangkan Susilo menggunakan media online (tribunnews.com, merdeka.com dan JPNN.com) sebagai objek penelitian. Perbedaan objek penelitian hanyalah berupa media cetak dan</p>
--	---	--	---

				<p>media online.</p> <p>Namun pada hakikatnya memiliki persamaan kegunaan yaitu menyampaikan pesan pada publiknya.</p>
2.	(Heny, Chatarina Surwati, 2016)	<p>Deskriptif kuitatif dengan menggunakan model analisis Sarah Mills.</p>	<p>film-film kayra Nia Dinata membangun persepsi mengenai konstruksi feminisme. Hasil penelitian mereka menyatakan bahwa, film sebagai produk budaya massa semakin menampilkan hal-hal yang manpu</p>	<p>sama-sama menggunakan metode analisis dari Sarah Mills. Dengan mengedepankan pandangan feminisme dan menganalisis melalui obyek dan subyek. Perbedaan penelitian Heny dan penelitian</p>

			<p>mendorong timbulnya konstruksi yang subyektif terhadap konsep feminsme. Selain itu, film- film yang menjadi objek dalam penelitian Heny yang di sutradari oleh perempuan sehingga unsur subjektifitas masih dimungkinkan mempunyai peranan dalam rangka melakukan konstruksi konsep feminsme.</p>	<p>penulis ialah antara film-film karya Nia Dinata, sedangkan penulis memiliki obyek penelitian media cetak majalah Politik dan Hukum Keadilan Indonesia. Penelitian dengan pandangan feminisme dari Heny memiliki persamaan pada penelitian penulis. Mengedepankan kesetaraan kaum laki-laki dan</p>
--	--	--	---	---

				perempuan di media massa.
3.	(Hasri, 2014), <i>Analisa Framing Pemberitaan Media Terhadap Perempuan Koruptor (Analisa Pembingkaiian Kasus Korupsi Angelina Sondakh pada Sampul Majalah Tempo.</i>		Majalah tempo mendefinisikan yang di hadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini masalah korupsi yang serius. Budaya korupsi dan sulitnya pemberantasan korupsi tidak bisa dilepaskan dari pengaruh Negara dan kekuasaan. Dan juga pada masalah moral, majalah tempo juga merepresantasikan Angelina Sondakh	Menggunakan model analisis <i>framing</i> atau bingkai. Sedangkan penelitian penulis menggunakan model analisis wacana / <i>discourse analysis</i> . Analisis <i>freming</i> hanya menggunakan penggambaran pada suatu objek yang di teliti sedangkan analisis wacana atau <i>discourse</i>

			<p>dengan gaya metaphor sebagai mana mirip Cathrine Tramell di film “<i>Basic Instinct I</i>” juga di gambarkan sebagai perempuan cantik dan pintar dalam artian sebenarnya, juga pintar berbohong.</p>	<p><i>analysys</i> menggunakan bahasa dalam teks untuk di analisis. Tapi bahasa yang dianalisis di penelitian ini agak berbeda dengan studi bahasa dalam pengertian linguistik. Dan persamaan penelitian ini ialah sama-sama menggunakan perempuan sebagai obyek penelitian.</p>
4.	(Rahayu, 2018), <i>Konstruksi Teks</i>		<p>Bahwa pemberitaan kasus</p>	<p>Perbedaan pada penelitian ini</p>

	<p><i>Pada Media Kompas dalam Pemberitaan Kasus Setyanovanto</i></p>		<p>dugaan korupsi yang melibatkan Setyanovanto tersebut telah mengundang perhatian banyak publik, di karenakan dari peran media yang secara terus menerus memberitakan kasus korupsi e-KTP.</p>	<p>adalah pada bagian pemberitaan media yang di pakai. Penelitian dari Rahayu (2018) menggunakan teks pada media Kompas, sedangkan penelitian penulis menggunakan teks pada pemberitaan politik emak-emak militan pada majalah Hukum dan Politik Keadilan Indonesia.</p>
--	--	--	---	--

5	<p>Perez (2012), <i>Gender Difference in Psychological Well-being among Filipino Collaege Student Samples</i></p>	<p>Metode penelitian adalah kuantitatif yang memiliki total sampel 588 yang terdiri dari laki-laki sebanyak 110 dan perempuan sebanyak 478 sampel</p>	<p>Terdapat perbedaan gender dalam hal pengalaman spiritual sehari-hari, hubungan dengan ayah, hibungan dengan teman sebaya, otonomi, hubungan positif dengan orang lain dan tujuan hidup. Tidak ada perbedaan gender yang ditemukan dalam aspek pengaruh positif, pengaruh negatif, hubungan ibu, hubungan guru, penguasaan lingkungan,</p>	<p>Perbedaan penelitian perez adalah metode yang di gunakan perez kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan metodologi kualitatif. persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pendekatan atau perspektif gender.</p>
---	---	---	--	--

			pertumbuhan pribadi.	
--	--	--	-------------------------	--

2.3 Kerangka Konseptual

Emak-emak adalah objek utama yang menjadi topik pemberitaan di majalah. Pemberitaan-pemberitaan ini pada umumnya fokus pada kebutuhan domestik emak-emak. Perempuan atau emak-emak menjadi pemberitaan utama yang mengalami masalah kehidupan yang berat. Seringkali emak-emak berperan sebagai objek utama. Objek perempuan sebagai titik penceritaan biasanya dikonstruksikan sebagai perempuan lemah. Namun demikian, emak-emak tersebut tetap dikomodifikasikan oleh kelompok elit. Di manfaatkan keberadaanya untuk mendapatkan dukungan pada saat Pilpres 2019.

Posisi emak-emak sebagai objek yang dipengaruhi oleh budaya patriarki melekat pada masyarakat. Budaya patriarki menyebarkan sistem kelembagaan dominasi laki-laki. Ketika perempuan menjadi objek pemberitaan tetapi tetap perempuan tidak bisa menceritakan dirinya. Ideologi feminis berasumsi bahwa perempuan didefinisikan dari sudut pandang laki-laki. Sehingga laki-laki adalah subjek dan perempuan menjadi objek. Adanya dominasi membuka peluang untuk terjadinya komodifikasi emak-emak. Hal inilah yang menjadi fokus penelitian, dimana pemberitaan tentang emak-emak militan berlandaskan budaya patriarki yang mengandung komodifikasi politik terhadap emak-emak itu sendiri.

Dalam membongkar posisi perempuan pada pemberitaan emak-emak militan, penelitian ini menggunakan analisis wacana Sarah Mills. Analisis ini mencoba menjelaskan posisi subjek dan objek. Menggunakan data dari artikel emak-emak militan, Sarah Mills menganalisis berdasarkan posisi subjek dan objek.

Penjelasan metode yang akan digunakan dalam penelitian akan dijelaskan pada bagian bab selanjutnya. Kaitan antara konsep pada bab ini, peneliti gambarkan dalam kerangka konseptual sebagai berikut;

2.2 Kerangka Konseptual

